

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Hal tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak Menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya.

Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang masif sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, baik yang meliputi pertambangan mineral, batu bara maupun pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>2</sup> Tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat dan wilayah-wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati.

---

<sup>1</sup>Salim H.S. (I), *Hukum Pertambangan Indonesia*, RajaGrafindo Persaja, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> [http:// www.tataruangindonesia.com/fullpost/pertambangan](http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/pertambangan)

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri.<sup>3</sup> Semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan baik apabila tidak mengubah fungsi pokoknya, yang mana menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Di samping itu, hutan mempunyai fungsi ekologi yang berarti melindungi, karena potensi hutan dan keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai penyangga keseimbangan, perlindungan kehidupan, memelihara kesuburan tanah, proteksi daerah aliran sungai, dan pengendali erosi. Namun saat ini sebagian hutan di Indonesia telah menjadi rusak yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kebakaran, peristiwa-peristiwa alam seperti gempa, longsor, banjir, hama dan penyakit ternak serta perbuatan manusia termasuk usaha pertambangan.<sup>4</sup>

Karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi pertambangan yang tidak terkendali dan tidak terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi yang tidak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerugian sosial dan budaya. Dilihat dari aspek sosial, pertambangan menimbulkan berbagai konflik, seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat, termasuk pembatasan akses dan penggusuran hak-hak masyarakat adat atas pemanfaatan sumber

---

<sup>3</sup> *Penjelasan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*

<sup>4</sup> *Ibid*

daya hutan di daerah. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat adat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai *magic* juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik operasi pertambangan yang pada akhirnya akan mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Fungsi sosial dan budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Namun peranan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Padahal konsep pengelolaan hutan sudah harus beralih ke paradigma yang baru, yang mampu mengakomodir partisipasi aktif masyarakat adat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan kehutanannya. Beberapa pertimbangan yang melatarinya: (a) masyarakat lokal adalah bagian atau sub-sistem ekosistem hutan, dimana masyarakat tersebut berada; (b) mereka adalah bagian terbesar dari subjek dan objek pembangunan Negara Indonesia; (c) mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumberdaya lokal dan pembangunan sektor apapun di wilayahnya, termasuk di dalam sektor kehutanan; (d) mereka sesungguhnya memiliki kekuatan yang secara potensial sangat besar, baik positif maupun negatif bagi pembangunan.<sup>5</sup> Kebijakan yang digunakan untuk melegitimasi

---

<sup>5</sup> [www.slidshare.net/golarbaso/masyarakat-desa-hutan](http://www.slidshare.net/golarbaso/masyarakat-desa-hutan), diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

masyarakat memanfaatkan hutan ialah Pasal 67 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal itu antara lain menetapkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, berhak mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan berhak mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam realitasnya, masyarakat adat di daerah tidak dapat menikmati hak-haknya secara bebas dengan beroperasinya perusahaan pertambangan yang telah banyak menimbulkan berbagai dampak negatif. Untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten sehingga kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan segala ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pertambangan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan secara tegas dinyatakan sebagai berikut.

“Apabila selesai melakukan penambangan dan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya”.

Namun, peraturan ini dalam kenyataannya hanya berlaku di atas kertas. Baik pengusaha pertambangan maupun aparat pemerintah, seolah menutup mata terhadap keberadaan peraturan ini. Padahal mestinya

perlindungan hutan dan masyarakat adat merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipisahkan, mulai dari eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, hingga penutupan areal sisa tambang.<sup>6</sup>

Demikian pula masalah pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur yang merupakan salah satu wilayah yang kaya akan lahan tambang, salah satunya batu bara, kawasan ini dikenal memiliki cadangan bahan tambang melimpah, khususnya batu bara. Pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, pemindahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten atau Kota mendorong kegiatan pertambangan batu bara berkembang pesat, maka harus diikuti dengan kemampuan yang memadai dari aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya termasuk pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat.

Untuk mengetahui upaya perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, perlu dilakukan suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertentu. Oleh karena itu, melalui penulisan hukum ini penulis melakukan penelitian hukum dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur”.

---

<sup>6</sup> Salim H.S.(I), *Op.Cit.*, hlm. 223

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimanakah aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?
2. Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ?

## C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

## D. Manfaat penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Lingkungan, mengenai aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Barat, hasil penelitian ini sebagai acuan dan referensi dalam pengendalian serta upaya perlindungan akan kualitas hutan dan masyarakat adat terhadap kegiatan pertambangan batu bara.
- b. Bagi masyarakat luas pada umumnya, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan oleh kegiatan pertambangan batu bara.

### E. Keaslian penelitian

Menurut sepengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan fokus penelitian yang berkaitan sebelumnya:

- |          |   |
|----------|---|
| 1. Judul | : Perlindungan Hutan dan Masyarakat Terhadap<br>Pertambangan Emas Di Kabupaten Nabire Papua |
| Nama     | : Grace Amelia Senggu   |
| Tahun    | : 2007  |
| Fakultas | : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta   |

Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua?

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

Hasil Penelitian : Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat pendatang baik secara perorangan maupun berupa kelompok masyarakat belum menunjukkan adanya perlindungan hutan dan masyarakat. Upaya perlindungan baru terlihat pada pelaku penambang yang berupa perusahaan khususnya PT. Hanjun, karena kerusakan hutan akibat penambangan ini lebih rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hutan dan masyarakat sudah mulai dilaksanakan namun belum optimal.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada lokasi, objek dan subjek penelitian. Penulis tersebut meneliti di Kabupaten Nabire Papua mengenai pertambangan emas. Sedangkan penelitian ini di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur mengenai pertambangan batu bara.



2. Judul : Perlindungan Hukum Kualitas Hutan Terhadap Kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Nama : Palti Martunas Silaban

Tahun : 2007

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah? Dan apakah ada hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *illegal logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan kualitas hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Hasil Penelitian : Perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya saja dalam prakteknya kurang maksimal. Hambatan

dalam perlindungan hukum kualitas hutan adalah adanya konflik antar regulasi dalam melindungi kualitas hutan, adanya otonomi daerah menyebabkan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang malah tidak melindungi kualitas hutan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan dan meningkatnya pembukaan lahan perkebunan tanpa izin di sektor hutan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum yaitu, mengenai kualitas hutan terhadap kegiatan *illegal logging* Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian ini mengenai perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Judul : Perlindungan Kawasan Hutan Melalui Pengawasan Alat Berat Pertambangan di Kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama : Maximilianus Aditia Hersajati

Tahun : 2003

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan yang berada dalam kawasan pinjam pakai kawasan hutan di

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan yang berada dalam kawasan pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian : Pelaksanaan perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan yang berada di kawasan pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, namun pengawasan alat berat ini masih dirasa kurang optimal, karena tidak adanya mekanisme pengurusan izin dalam penggunaan alat berat pertambangan terlebih penggunaan alat berat pertambangan yang berada di kawasan pinjam pakai kawasan hutan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terdapat pada perlindungannya, yaitu mengenai perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan penelitian ini mengenai perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara ditinjau melalui aspek hukum di Provinsi Kalimantan Timur.

F. Batasan konsep

1. Aspek hukum yaitu, mempertimbangkan sesuatu dari ruang lingkup atau sudut pandang hukum dengan menggunakan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia.<sup>7</sup>
2. Perlindungan hutan yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah perlindungan kawasan hutan yang terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perlindungan kawasan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara dan masyarakat atas kawasan hutan.
3. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>8</sup> Masyarakat adat yang menjadi sasaran penelitian penulisan hukum ini adalah masyarakat adat Dayak Bahau, Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

---

<sup>7</sup> kbbi.web.id, diakses pada tanggal 3 November 2014

<sup>8</sup> *Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I*, Jakarta, 2010

4. Pertambangan Batu Bara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pertambangan batu bara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertambangan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara yang berada di kawasan Kampung Tukul yaitu P.T. Kedap Sayaaq.

#### G. Metode penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama.<sup>9</sup>

##### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES, 1981, hlm. 1

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 87

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- f) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70 Tahun 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan
- g) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  - k) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, baik hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Data primer

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai responden dan narasumber. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 220

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, baik hasil penelitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena pada lokasi tersebut terdapat hutan yang di manfaatkan sebagai wilayah pertambangan. Hal ini dapat membantu penulis untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara.

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekelompok/himpunan khususnya orang yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana yang ditentukan.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat di sekitar wilayah usaha pertambangan atau yang terkena dampak langsung oleh usaha pertambangan batu bara.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu, pemilihan sampel yang

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 28



dilakukan berdasar pada karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui.

#### 6. Responden dan narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku penambangan batu bara PT. Kedap Sayaaq yang di wakili oleh Bapak Stanislaus selaku HR. Superintendent dan Kepala Adat dari masyarakat adat Dayak Bahau Kampung Tukul Bapak Martinus.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kantor Kecamatan Tering Kutai Barat,  
Bapak Royen, S.Pd,M.Si.
- 2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Barat, Bapak  
Mobilala, ST.
- 3) Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat, Bapak  
Ir. H. Achmad Sofyan, MM.
- 4) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kutai Barat, Bapak Ali Sadikin,  
SE.M.Si. selaku Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
- 5) Kepala Dinas UPT Laboratorium Lingkungan Kutai Barat, Bapak  
Ery Sulastyo, ST.MT.

#### 7. Metode Analisis

Metode yang akan dipergunakan dalam menganalisis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis dan lisan, dan juga prilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan berpikir induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

